KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

KEMENTER.	IAN KEUANGAN RI	H.1	H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 1 1 4 4				H.4 X Final	
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK			H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan				H.5 Tidak Final	
A IDENTITAS PE	NERIMA PENGHASILA	N YANG	DIPOTONG			•		
A.1 NPWP		7 6	2 4 9 7	22 000				
A.2 NIK :								
A.3 Nama	: SALIANSYAH							
B. PPh PASAL 21	I YANG DIPOTONG							
MASA PAJAK (mm-yyyy) KODE OBJEK PAJAK		JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)		DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1	B.2		B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	
3	3 21-402-01		1.688.800	1.688.800	0	5	84.440	
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 026/SP2D-GU/BLUD-RSJDAHM/III/2022 Biaya Pembayaran Tanggal 1 6 dd 0 3 mm 2 0 2 2 yyyy B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB. Nomor : Tanggal dd mm yyyy B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan : B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :								
C.1 NPWP Instai	C.1 NPWP Instansi Pemerintah : 9 5 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0							
C.2 Nama Instan	2 Nama Instansi Pemerintah : RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR							
C.3 ID Subunit C	C.3 ID Subunit Organisasi :							
C.4 Tanggal	:	1 6	1 6 dd 0 3 mm 2 0 2 2 yyyy					
C.5 Nama Penan	datangan :	HARI J	HARI JUMADI					
C.6 Pernyataan \	rataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.							
			Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan.					

44UGT16Z